

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai analisis sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Serta pengalaman magang penulis di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dan prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan selaras dengan peraturan gubernur yang berlaku.
2. Tahap-tahapan penting yang meliputi proses penerapan sistem ini seperti penyusunan dan penyerahan DPA-SKPD, verifikasi dokumen anggaran, penyusunan anggaran kas daerah, dan penerbitan surat penyediaan dana (SPD). Setiap tahapan sudah sesuai dengan prosedurnya dan juga memiliki dokumen yang terlibat serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di tiap-tiap tahapannya.
3. Walaupun sistem sudah dilakukan secara sistematis, masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat efektivitas penerapannya, yaitu adanya lokasi yang masih sulit dijangkau/akses, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di beberapa bidang, dan juga keterlambatan administrasi dan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang belum

dilakukan secara optimal dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan.

4. Untuk mengatasi kendala-kendala atau hambatan yang terjadi di Dinas Kehutanan tersebut, penulis juga memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi untuk disetiap kendalanya seperti, Menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal, penggunaan teknologi drone, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan tenaga teknis kontrak, penguatan sistem informasi keuangan, serta penerapan monitoring dan evaluasi berkala.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan sistem akuntansi keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Optimal

Dinas Kehutanan disarankan untuk mengintegrasikan sistem keuangan berbasis digital, seperti penggunaan SIPD atau aplikasi lainnya yang mendukung validasi data secara otomatis, untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalisir kesalahan manual.

2. Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia

Perlu diadakan pelatihan rutin dan berkelanjutan khususnya dibidang akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta penggunaan aplikasi sistem keuangan berbasis teknologi, sehingga SDM mampu menyesuaikan dengan perkembangan sistem informasi modern.

3. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi

Dinas Kehutanan perlu meningkatkan sinergi antara PPKD, TAPD, SKPD, dan seluruh unit kerja terkait, sehingga proses verifikasi, pengesahan, dan pencairan dana dapat berlangsung lebih efektif serta tepat waktu.

4. Optimalisasi Mitigasi Risiko Di Lapangan

Untuk mengatasi hambatan geografis, pemanfaatan teknologi drone dan pemberdayaan komunitas lokal harus dimaksimalkan dalam mendukung pengawasan hutan dan mempercepat pelaksanaan program kehutanan.

5. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Secara Rutin

Dinas kehutanan perlu menerapkan mekanisme evaluasi dan pemantauan berkala terhadap sistem akuntansi keuangan daerah agar potensi permasalahan dapat terdeteksi lebih awal dan upaya perbaikan dapat dilakukan secara terus-menerus.

Dengan diterapkannya saran-saran diatas, diharapkan penerapan sistem akuntansi keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

